

Mewujudkan Digitalisasi Pelayanan Pemerintah Dalam Upaya Mencapai Desa Digital Di Desa Banjarsari Kabupaten Probolinggo

Realizing The Digitalization Of Government Services In An Effort To Achieve A Digital Village In Banjarsari Village, Probolinggo District

Serly Dian Anugrah¹, Muhammad Rici Nur Ardiansyah², Dina Ayu Rahmawati³, Azka Hardianti Aniq⁴, Yasmin Nur Kholisa⁵, Anggie Novita Rahmadani⁶, Shinta Aurellia Maharani⁷, Afiza Augustika Wardani⁸, Yaafi Roozan Prasojo⁹, Calvin Edo Wahyudi¹⁰

¹⁻¹⁰ Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya

Korespondensi penulis : serlydianugrah@gmail.com

Article History:

Received: 13 November 2023
Accepted: 06 Desember 2023
Published: 31 Desember 2023

Keywords: Digital Village, Public Services, Village Website, UPNVJT Village Development MBKM Students

Abstract: *In the current digital era, digital transformation in the government sector is an obligation to implement, including village governments. However, in fact, there are still many villages in Indonesia that have not implemented digitalization in their public services. Banjarsari village is one of the villages where the development of digitalization still requires special handling because there are several obstacles, one of which is that the village government lacks technological skills. Therefore, MBKM Bina Desa UPNVJT students provide guidance and service to Banjarsari Village officials and the community to create a digital village in Banjarsari Village. This article aims to describe the efforts of the Banjarsari Village government in realizing digital-based government services. The method used is the sharing session method and assistance in managing the village website to Banjarsari Village officials. The results obtained were collaboration between the Banjarsari Village government and UPNVJT Village Development MBKM students regarding the establishment of the Banjarsari Village website and the implementation of sharing sessions in improving the quality of public services in Banjarsari Village.*

Abstrak

Pada era digital saat ini, transformasi digital di sektor pemerintahan menjadi kewajiban untuk diterapkan, tidak terkecuali pemerintah desa. Namun faktanya, masih banyak dari desa di Indonesia yang belum menerapkan digitalisasi dalam pelayanan publiknya. Desa Banjarsari merupakan salah satu desa yang dalam pengembangan digitalisasi masih diperlukan penanganan khusus karena terdapat beberapa kendala salah satunya pemerintah desa yang kurang memiliki keterampilan teknologi. Maka dari itu, mahasiswa MBKM Bina Desa UPNVJT memberikan pembinaan sekaligus pengabdian kepada perangkat Desa Banjarsari dan masyarakatnya untuk mewujudkan desa digital di Desa Banjarsari. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya pemerintah Desa Banjarsari dalam mewujudkan pelayanan pemerintah yang berbasis digital. Metode yang digunakan adalah metode sharing session dan pendampingan pengelolaan website desa kepada perangkat Desa Banjarsari. Hasil yang didapatkan yakni adanya kolaborasi antara pemerintah Desa Banjarsari dengan mahasiswa MBKM Bina Desa UPNVJT mengenai pembentukan website Desa Banjarsari dan pelaksanaan sharing session dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Desa Banjarsari.

Kata Kunci: Desa Digital, Pelayanan Publik, Website Desa, Mahasiswa MBKM Bina Desa UPNVJT

PENDAHULUAN

Indonesia saat ini melalui tahap digital society 5.0, yang dimana hal ini Sumber Daya Manusia berperan aktif dalam menggalakkan aksi interaksi organisasi dengan masyarakat melalui penggunaan sarana dan prasarana berbasis digital. Peran digital society 5.0 membawa dampak yang baik bagi masyarakat dan juga memberikan dampak yang buruk bagi masyarakat, dalam organisasi pemerintah untuk memberikan pelayanan mampu memenuhi tingkat profesionalitas pegawai serta berpartisipasi dalam perhatian publik yang nantinya sebagai penilaian masyarakat terkait sikap, etika, juga kode etik untuk pembangunan bangsa di era digital. Untuk organisasi swasta juga berperan penting dalam memberikan pelayanan kepada klien serta masyarakat yang ingin mengurus kepentingan baik dalam kelompok maupun individu, tak lupa juga kerja sama pemerintah dengan swasta harus lebih banyak digalakkan dari segi sosial budaya, serta ekonomi yang tujuannya untuk menambah penghasilan negara dalam meningkatkan infrastruktur sarana serta prasarana yang akan dikelola oleh pemerintah pusat serta masyarakat. Era digital kian lebih banyak tantangan yang perlu dihadapi oleh pemerintah maupun swasta, terutama dalam hal berorganisasi yakni adanya serangan penyakit kesenjangan pegawai dalam mengerjakan profesionalitasnya atau kurang minat dalam melaksanakan pekerjaan yang ingin dikerjakan, nafsu akan hal kekuasaan bisa menjadi polemik dalam melaksanakan pekerjaan yang tidak sehat, masih adanya gangguan komunikasi antara atasan dengan bawahan namun tidak semua organisasi yang menerapkan itu, dan tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dengan hal tersebut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil menjelaskan tujuan secara rinci dalam melakukan evaluasi kinerja pegawai yakni sebagai penjamin objektivitas dalam hal membina serta mendasari sistem prestasi serta jalan karir.

Dalam era digital saat ini yang semakin berkembang, transformasi digital di sektor pemerintahan daerah menjadi suatu kewajiban. Sudah menjadi keharusan perkembangan infrastruktur digital guna meningkatkan efisiensi, responsivitas, serta keterbukaan pelayanan publik. Perkembangan infrastruktur digital di pemerintahan daerah tidak dapat dipisahkan dari konteks global dan nasional. Globalisasi informasi teknologi sendiri sudah menciptakan tantangan dan peluang baru yang patut diberi kemudahan oleh pemerintahan suatu daerah setempat. Sedangkan di tingkat nasional, arah kebijakan dan kerangka regulasi yang turut membangun arah perkembangan infrastruktur digital di tingkat daerah.

Pemerintah daerah berperan penting dalam mewujudkan digitalisasi pelayanan pemerintah menuju membangun desa digital. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan melaksanakan urusan pemerintahan yang sesuai

dengan kewenangannya, termasuk urusan pemerintahan di bidang pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Memberikan pelayanan publik yang berkualitas dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pemerintahnya. Digitalisasi pelayanan pemerintah merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan digitalisasi pelayanan pemerintah, masyarakat dapat memperoleh pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan terjangkau. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. Desa digital merupakan desa yang memanfaatkan teknologi digital dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam aspek pelayanan publik. Dengan desa digital, masyarakat desa dapat memperoleh pelayanan publik yang lebih berkualitas dan lebih terjangkau. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengambil langkah-langkah untuk mewujudkan digitalisasi pelayanan pemerintah dalam upaya mencapai desa digital. Langkah-langkah tersebut dapat berupa meningkatkan anggaran untuk digitalisasi pelayanan pemerintah, meningkatkan kapasitas aparat desa dalam bidang teknologi informasi, dan juga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang digitalisasi pelayanan pemerintah

Pada dasarnya, konsep desa digital mencakup dua unsur penting yaitu pemberdayaan masyarakat desa dan teknologi informasi (Suyatna, 2019). Mengingat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, maka paradigma pembangunan pedesaan berbasis internet menjadi penting (Muhammad Badri, 2016). Berbagai sumber menyebutkan bahwa dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi di Desa bisa meningkatkan partisipasi dan keterbukaan di desa. Adanya sistem desa digital melalui sistem informasi desa akan mempermudah komunikasi dalam suatu desa antara perangkat desa dengan warga melalui media komunikasi, Dengan adanya sistem informasi desa maka masyarakat akan lebih mudah dalam mengakses perencanaan maupun realisasi anggaran desa (Wardani, 2018).

Beberapa desa di Indonesia sudah banyak menciptakan aplikasi sistem informasi desa yang disediakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi-aplikasi tersebut dibuat secara top-down, yaitu berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan eksternal, bukan dari desa. Padahal, sistem informasi yang baik muncul dari kebutuhan internal desa. Hasil penelusuran awal di wilayah Desa Banjarsari adalah arsip dokumen tidak terorganisir secara sistematis, masyarakat kesulitan mengakses informasi tentang desa, sistem informasi dan pengelolaan yang berbasis komputer dan website desa dan juga staf desa yang kurang memiliki keterampilan dalam menangani data yang terkomputerisasi. Maka dari itu dengan adanya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Bina Desa dari Kampus Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur Surabaya,

mahasiswa program studi Administrasi Publik mampu memberikan pembinaan serta wawasan sekaligus pengabdian kepada masyarakat terkait tema digital desa dengan tujuan memajukan desa menjadi ber-Sumber Daya Manusia yang terampil dan bisa menjadi contoh dari desa lainnya.

Dalam hal ini, Mahasiswa MBKM Bina Desa Banjarsari melaksanakan salah satu program kerjanya yakni launching website desa serta pendampingan pengelolaan pengisian website desa. Pendampingan pengelolaan ini perlu dilaksanakan agar perubahan-perubahan yang ada di Desa Banjarsari ini dapat terbaharui secara bertahap. Website desa adalah wadah bagi Pemerintah desa untuk menunjukkan kepada masyarakat desa itu sendiri maupun masyarakat luas terkait informasi atau profil desa tersebut. Website desa ini akan dikelola oleh perangkat Desa Banjarsari dengan tujuan melayani publik. Dengan adanya website desa ini diharapkan bisa membantu berjalannya pelayanan publik menjadi lebih efisien dan juga bisa memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi-informasi penting yang dapat membuat masyarakat menjadi lebih gampang akan digitalisasi masa kini.

METODE

Pada kegiatan bina desa yang bertepatan “Membangun dan Mewujudkan Desa Digital” di Desa Banjarsari Kabupaten Probolinggo yang dilakukan oleh Kelompok MBKM Bina Desa Banjarsari ini dilaksanakan melalui metode sharing session dan pendampingan pengelolaan website desa kepada perangkat Desa Banjarsari. Dalam mewujudkan tema tersebut Kelompok MBKM Bina Desa Banjarsari melakukan 4 tahapan yang terdiri dari:

1. Kemitraan dari pihak Pemerintah Desa Banjarsari dengan Prodi Administrasi Publik UPNVJT
2. Workshop Pengelolaan Website Desa dalam Rangka Pendampingan Mitra Bina Desa
3. Sharing Session dengan tema “Optimalisasi Pelayanan Administrasi melalui Pengelolaan Data dan Website Desa”
4. Pendampingan Pengisian Website Desa

Pada tahap sharing session atau bertukar pikiran dan sharing mengenai keluhan-keluhan serta tantangan yang dihadapi oleh perangkat desa Banjarsari dalam pengelolaan data maupun pelayanan publik yang berbasis digital yang ditargetkan untuk seluruh perangkat desa Banjarsari terutama pada bagian yang menangani pelayanan administrasi, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya pengelolaan data dan website desa dalam

meningkatkan pelayanan administrasi kepada masyarakat. Pada kegiatan sharing session ini Kelompok MBKM Bina Desa Banjarsari mengundang Bapak Gofur selaku operator desa sebagai narasumber dan pemateri.

Pada tahap workshop pengelolaan website desa dalam rangka pendampingan mitra bina desa ini merupakan kegiatan dari Program Studi Administrasi Publik Universitas UPN Veteran Jawa Timur kepada mitra-mitra bina desa serta mahasiswa bina desa sebagai kegiatan launching website desa dan pemberian materi dalam pengisian website desa yang didampingi langsung oleh Bapak Muslim Aswaja dari UPT TIK UPN Veteran Jawa Timur. Sedangkan tahap pendampingan pengisian website desa ini dilakukan oleh kelompok bina desa secara lebih mendetail dan menyeluruh dalam pemberian pelatihan dan pendampingan pengisian serta pengelolaan website desa yang ditujukan untuk perangkat desa banjarsari pada bagian pelayanan serta operator desa.

Sebelum melaksanakan 3 tahapan tersebut Kelompok MBKM Bina Desa Banjarsari melakukan analisa pada pelayanan administrasi desa Banjarsari yang kemudian menemukan permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah desa Banjarsari. Serta mengumpulkan data-data dan juga informasi seputar Desa Banjarsari baik internal maupun eksternal yang digunakan untuk pengisian website desa.

HASIL

Workshop Pengelolaan Website Desa dalam Rangka Pendampingan Mitra Bina Desa

Website desa merupakan bentuk kemajuan teknologi sistem informasi desa sebagai sarana penyebaran informasi dan publikasi terkait desa untuk masyarakat (Redy et al., 2022). Website digunakan oleh aparat desa untuk berbagi informasi secara umum dan mengenai informasi pemerintahan desa sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi dimana saja dan kapan saja serta adanya website desa memberikan masyarakat dapat akses terhadap informasi publik. Mahasiswa MBKM Bina Desa Banjarsari telah melakukan launching website desa serta melakukan pendampingan pengelolaan pengisian website desa.

Pada tanggal 6 Oktober 2023 program studi administrasi publik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur telah melaksanakan kegiatan dengan tema “Workshop Pengelolaan Website Desa Dalam Rangka Pendampingan Mitra MBKM Bina Desa”, bertempat di Bale Hinggil, Kabupaten Probolinggo. Kegiatan workshop ini melibatkan Kepala desa dan perangkat desa dari 3 desa (Desa Banjarsari, Desa Sumberbendo, dan Desa Laweyan), pemateri dari tim IT pembuatan dan pengelolaan website desa, dosen program studi administrasi publik UPN Veteran Jawa Timur, serta 2 mahasiswa dari masing-masing desa.

Tujuan dari workshop pengelolaan website desa ini yakni sebagai kegiatan launchingnya website desa serta untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pemangku kepentingan desa terhadap pengelolaan website untuk mendukung ketersediaan publikasi yang dapat diakses oleh pemerintah desa dan masyarakat desa.

Dalam workshop pengelolaan website desa ini materi yang disampaikan adalah cara mengelola website desa seperti mengupdate dan mengubah informasi yang disediakan pada website desa. Kegiatan workshop ini terdiri dari 2 sesi dengan pengisian materi yang berbeda mengenai pengelolaan website. Pada sesi pertama yakni sambutan dari dosen administrasi publik UPN Veteran Jawa Timur bahwa telah launching website desa, kemudian dilanjutkan oleh pemateri dari tim IT pembuat website desa yang menjelaskan pentingnya website desa yang dapat memberikan kontribusi terkait potensi yang dimiliki desa dan menjelaskan cara mengelola dan mengisi website pada bagian homepage serta menu profil desa dan pemerintahan. Pada sesi kedua dilanjutkan dengan pengisian materi oleh tim IT pembuat website desa yang menjelaskan cara mengisi website desa pada menu bagian informasi publik dan pelayanan.

Kegiatan workshop pengelolaan website ini mendapat perhatian dan diterima baik oleh pemerintah desa, hal ini terlihat dengan hadirnya Kepala desa dan perangkat desa berupa respon yang positif dengan mendukung untuk mengikuti kegiatan workshop ini. Selama kegiatan berlangsung, antusias dari para perangkat desa sangat tinggi yang dimana selama pemateri memberi penjelasan terkait pengelolaan website desa yang selalu bertanya terkait website desa tersebut. Selain itu, kegiatan workshop pengelolaan website desa ini juga berjalan dengan lancar karena adanya pendampingan mahasiswa yang ikut membantu mengarahkan perangkat desa selama penjelasan materi.

Dengan adanya workshop pengelolaan website desa ini diharapkan dapat membawa banyak manfaat utamanya dalam memberikan informasi publik bagi masyarakat desa untuk membantu berjalannya pelayanan publik menjadi lebih mudah, selain itu dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi pemerintahan desa. Dengan adanya website desa ini, pihak perangkat desa menjadi lebih berinovasi dan lebih mengupdate informasi dalam desa untuk disebarluaskan kepada masyarakat untuk dapat menunjukkan akuntabilitas menyangkut transparansi kinerja pemerintah desa.

Sharing Session Pengelolaan Data

Sharing Session atau yang lebih dikenal dengan sesi tukar pikiran merupakan sebuah panel diskusi yang dilakukan antara pemerintah desa banjarsari dan mahasiswa MBKM Bina

Desa sebagai upaya mewujudkan pelayanan administrasi pemerintah desa yang lebih optimal. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada 19 Oktober 2023 tepat pada pukul 10.00 WIB di aula balai desa Banjarsari, dengan mengangkat nama kegiatan “Optimalisasi Pelayanan Administrasi Melalui Pengelolaan Data dan Website Desa”. Kegiatan sharing session ini melibatkan seluruh elemen pemerintah desa banjarsari terutama perangkat yang menangani pelayanan administrasi. Sharing Session ini berfokus pada pentingnya pengelolaan data desa guna memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih efektif dan efisien. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan pemerintah desa dapat memahami pentingnya pengelolaan data secara tepat dan akurat dengan memaksimalkan pengelolaan data desa. Secara garis besar kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui dua tahap yaitu survei data, pelaksanaan sharing session, dan kegiatan pendampingan website desa.

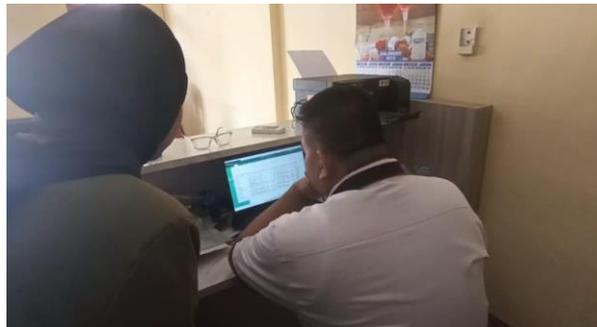
Program kerja ini diawali dengan survei data desa ke beberapa perangkat desa terkait. Setelah ditemukan beberapa kendala berkaitan dengan pengelolaan data yakni tidak maksimalnya pengelolaan data salah satunya data kependudukan. Ditemukan bahwa pengelolaan data base pada desa banjarsari terbengkalai serta tidak diperbarui dalam beberapa tahun, salah satunya rekapan data kependudukan yang terakhir ada di tahun 2020. Akibatnya, kegiatan pelayanan seperti pemberian bantuan dari pemerintah dan lain-lain menjadi tidak tepat sasaran. Permasalahan terkait pengelolaan data ini juga disampaikan langsung oleh Sekretaris Desa Banjarsari yakni Bapak Asyari, beliau mengungkapkan bahwa terdapat stagnasi dalam pengelolaan data kependudukan di Desa Banjarsari yang mana seharusnya rekapan data tersebut sangat penting sebagai salah satu acuan Pemerintahan Desa dalam menjalankan kebijakan yang telah dirumuskan.

Beliau juga mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang membuat tidak terurusnya pengelolaan data di Desa Banjarsari diakibatkan oleh faktor kurangnya kesadaran dari Perangkat Desa Banjarsari dalam melakukan rekapan dan juga pembaruan data, faktor kurangnya kemampuan dalam mengoperasikan fasilitas teknologi juga menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan data kependudukan Desa Banjarsari tidak terkelola dengan baik. Selain faktor dari internal Pemerintahan Desa, juga terdapat faktor dari pihak eksternal yakni masyarakat Desa Banjarsari. Umumnya terdapat tiga metode yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa dalam memperoleh data kependudukan, yakni melalui cara Survei, Sensus, dan Registrasi Penduduk. Tentunya metode-metode tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh satu pihak saja salah satunya dari masyarakat. Dalam kasus ini, kurangnya kesadaran dari masyarakat dalam melaporkan pembaruan data kependudukan oleh masing-masing Kepala Keluarga mengakibatkan kurangnya pembaruan data yang diperoleh Pemerintah Desa, dengan

tidak adanya kesadaran dari masyarakat tersebut juga menjadikan salah satu faktor tidak terkelolanya dengan baik data kependudukan di Desa Banjarsari. Dampak dari kurang terkelolanya data dengan baik juga dirasakan oleh Kelompok MBKM Bina Desa Banjarsari, hal tersebut dapat dilihat ketika proses Mahasiswa MBKM Bina Desa akan mengumpulkan data guna menyusun Laporan Analisis Situasional Desa Banjarsari dan juga data yang diperlukan untuk Program Kerja di Bidang Digital Bisnis.

Ketidakkonsistenan informasi terkait data yang dibutuhkan membuat lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan data dan juga dalam menyelesaikan tugas tersebut. Pada Proses Pengumpulan data pelaku usaha yang ada di Desa Banjarsari, Mahasiswa MBKM Bina Desa merasa kebingungan mengenai pada siapa data tersebut direkap, dan kapan terakhir kali data pelaku usaha diperbarui. Dan ditemukan juga kendala perekapan data pelaku usaha yang mana terakhir kali data tersebut diperbarui adalah pada tahun 2020. Didasarkan dari permasalahan tersebut dan juga atas saran dari Sekretaris Desa Banjarsari dibentuklah suatu kegiatan dari Program Kerja Bidang *Digital Government* yaitu *sharing session* yang memiliki tujuan memberikan pemahaman kepada pemerintah desa mengenai pentingnya pengelolaan data secara maksimal dengan memanfaatkan digitalisasi. *Sharing session* ini juga merupakan wadah bagi perangkat desa untuk dapat bertukar pikiran dengan mahasiswa terkait hambatan yang dihadapi dan mendiskusikan solusi yang dapat dilakukan.

Gambar 1. Survey data desa ke perangkat desa



Kemudian, tahapan kedua dari kegiatan ini adalah pelaksanaan *sharing session* yang dilaksanakan secara luring bersama perangkat desa banjarsari. Dalam pelaksanaan *sharing session* ini, mahasiswa MBKM Bina Desa memberikan materi terkait pengoptimalan pelayanan administrasi melalui pengelolaan data meliputi pentingnya pengelolaan data, sebab akibat tidak diolahnya data, kekurangan dan hambatan pengelolaan data dan adopsi inovasi. Penyampaian materi pada kegiatan tersebut disampaikan oleh Mahasiswa MBKM Bina Desa Banjarsari yang telah mendapatkan tugas sesuai urutan materi. Kegiatan dibuka dengan

memaparkan materi sesuai yang telah ditentukan dengan berdasar pada kendala-kendala yang dirasakan oleh Pemerintahan Desa Banjarsari dan juga penyampaian kritik dari Mahasiswa MBKM Bina Desa Banjarsari. Mahasiswa MBKM Bina Desa Banjarsari memberikan beberapa poin yang dapat dikatakan sebagai kritik kepada Pemerintah Desa Banjarsari mengenai apa saja kendala yang dirasakan oleh Mahasiswa MBKM Bina Desa Banjarsari dalam proses-proses pengumpulan data untuk kebutuhan persiapan program kerja yang akan dilaksanakan selama Bina Desa. Yang nantinya penyampaian kritik tersebut akan diulas lagi dan dibahas pada sesi selanjutnya yakni sesi diskusi antara Seluruh Mahasiswa MBKM Bina Desa dan Pemerintah Desa Banjarsari.

Tidak hanya memaparkan materi berupa narasi poin-poin saja, Mahasiswa MBKM Bina Desa juga mengambil contoh sampel Desa lain yang memiliki sistem pengelolaan data base yang baik dan juga telah menerapkan pelayanan maupun informasi desa secara digital, langkah tersebut dilakukan oleh Mahasiswa MBKM Bina Desa dengan harapan agar para Perangkat Khususnya Perangkat dengan tupoksi di bagian pelayanan administrasi dapat termotivasi dan juga mendapatkan referensi bagaimana mengelola data dan website desa dengan baik dan efisien. Dalam pemberian materi ini, harapan yang ingin dicapai oleh mahasiswa MBKM Bina desa ialah untuk membantu pemerintah desa banjarsari untuk sadar akan kebermanfaatan pengelolaan data desa seperti halnya dapat meningkatkan produktivitas pelayanan, membantu pengambilan keputusan, meningkatkan sumber daya manusia dan juga mendukung adanya perencanaan pembangunan desa berkelanjutan jika data diolah dengan tepat.

Gambar 2. Pemberian materi dari mahasiswa MBKM Bina Desa kepada pemerintah desa Banjarsari



Setelah pemberian materi pada perangkat desa, dibukalah sesi diskusi yang dipimpin oleh bapak Ghofur selaku operator Desa Banjarsari, pada sesi ini perangkat memberikan argumen, saran dan juga opininya sebagai bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan dan

juga pengelolaan data yang selama ini dilakukan di desa banjarsari. Dalam sesi ini diketahui bahwa sebab tidak diolahnya data dengan benar adalah kurangnya kesadaran akan potensi dan manfaat yang diperoleh dari pengelolaan data yang efektif oleh Pemerintahan Desa Banjarsari. Pada sesi ini, terdapat juga pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh beberapa rekan Mahasiswa MBKM Bina Desa Banjarsari yang ditujukan kepada Perangkat Desa Banjarsari berdasarkan kendala yang dihadapi selama pelaksanaan Bina Desa. bapak Ghofur sebagai pemimpin sesi diskusi ini juga menyampaikan beberapa kritik kepada rekan perangkat desa lainnya atas dasar tugas yang dijalankan oleh beberapa perangkat desa yang kurang maksimal dan cenderung menyepelkan, dengan adanya sikap tersebut dikhawatirkan akan menghambat keperluan-keperluan desa baik untuk masyarakat maupun pihak eksternal yang berkaitan dengan data base desa menjadi terhambat dan tidak terpenuhi. Selain menyoroti kinerja dari beberapa perangkat desa, sesi diskusi ini juga membahas poin kendala yang berasal dari tidak adanya regulasi dan kebijakan yang jelas dalam pengelolaan data yang hal ini dapat menghambat adanya inovasi pelayanan publik. Sebelum rangkaian kegiatan sharing session ini selesai, dalam kegiatan ini juga disisipkan kegiatan pendampingan pengisian website desa dimana hal tersebut dilakukan dengan sebagai bentuk praktek langsung dari salah satu poin yang disampaikan pada saat penyampaian materi.

Gambar 3. Sesi Sharing Session



Kegiatan *Sharing Session* ini dapat dikatakan berhasil terimplementasi dan telah mencapai tujuan yang diharapkan oleh Mahasiswa MBKM Bina Desa Banjarsari dimana keberhasilan tersebut dapat dilihat dari interaktifnya pihak Perangkat Desa dan juga Mahasiswa MBKM Bina Desa pada sesi diskusi yang maha hal tersebut dapat membuat kendala-kendala dan juga beberapa pertanyaan mendapatkan solusi serta jawaban. Keberhasilan dapat juga dilihat pada kepedulian perangkat desa dalam mengelola website desa dan juga adanya keinginan untuk menguasai tata cara mengelola data melalui aplikasi Excel.

Pelaksanaan Pendampingan Website Desa

Pendampingan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang ahli dan paham untuk melakukan pengajaran, pengarahan kepada sekelompok orang yang menginginkan pendampingan (Hamza et al., 2022) . Website desa adalah sebuah kanal yang menyajikan informasi desa yang dapat dilihat oleh khalayak umum baik internal dari desa tersebut ataupun eksternal dari desa lain (Airlangga et al., 2020). Penyampaian informasi melalui website desa merupakan wujud dari berkembangnya teknologi dan informasi yang saat ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai kalangan.

Pendampingan yang kedua dilakukan oleh mahasiswa MBKM Bina Desa Banjarsari. Pendampingan kedua dilaksanakan selama 4 hari berturut-turut yakni pada tanggal 19 - 24 Oktober 2023 yang bertempat di ruang pelayanan terpadu Desa Banjarsari. Diadakannya pendampingan ini bertujuan untuk menelaah serta mempelajari secara intensif bagaimana desain website yang diinginkan oleh perangkat desa dan yang diinginkan oleh mahasiswa KKN MBKM Bina Desa Banjarsari. Pada pendampingan kedua ini kami memfokuskan kepada perangkat desa terutama pada bidang pelayanan, serta operator Desa Banjarsari. Kami memilih perangkat desa di bidang pelayanan serta operator desa karena kami merasa informasi pada website desa ini harus berkembang secara terus menerus mengikuti dinamika perubahan Desa Banjarsari itu sendiri. Rencana tersebut berbanding lurus dengan kemauan serta kegigihan perangkat desa untuk senantiasa belajar perihal teknologi dan informasi.

Untuk menyukseskan pelaksanaan pendampingan tersebut, kami membagi seluruh mahasiswa MBKM Bina Desa Banjarsari ke dalam 4 hari. Oleh karena itu 2 hari sebelum pelaksanaan pendampingan, penanggung jawab program kerja website desa memberikan pemahaman kepada rekan-rekan perihal pengisian website desa ini. Pemahaman kepada rekan-rekan dilakukan dengan tujuan ketika melakukan pendampingan, apabila terdapat ketidakpahaman oleh perangkat desa, maka tim pendamping akan mengatapsi hal tersebut. Pemberian pemahaman kepada teman-teman dilakukan secara bergantian sesuai dengan jadwal yang telah diberikan, yakni pada tanggal 19 pengisian pada bagian pelayanan, tanggal 20 pengisian pada bagian informasi publik, tanggal 23 pengisian pada bagian pemerintahan, dan tanggal 24 pengisian pada bagian profil.

Pelaksanaan pendampingan dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober melakukan pengisian pelayanan yang ada di desa Banjarsari, setelah pelaksanaan sharing session. Teknis pelaksanaan yang dilakukan yakni salah satu penanggungjawab program kerja website desa menjadi moderator untuk memandu seluruh perangkat desa yang hadir, serta tiap perangkat desa didampingi oleh tiap mahasiswa. Untuk menyukseskan hal tersebut, maka mahasiswa

MBKM bina desa memfasilitasi laptop agar perangkat desa bisa lebih paham dan leluasa. Teknis pelaksanaan tersebut berlangsung selama 3 hari ke depan, yakni pada 24 Oktober pada pengisian profil desa di website desa Banjarsari.

Informasi serta persyaratan pelayanan merupakan hal yang dinamis, dan hal tersebutlah yang menyebabkan kami berpikir jangka panjang terkait program kerja ini. Ide yang terbesit agar program kerja kami tidak mengkrak begitu saja ialah kami berinisiatif untuk melakukan pemanduan pengisian melalui rekam layar pada laptop yang dipandu secara step by step dengan rekaman suara kami. Untuk melakukan perekaman tersebut, kamu memerlukan waktu selama 2 hari serta melakukan pengisian secara umum informasi yang kami ketahui. Pengisian selanjutnya, dilakukan oleh perangkat desa terutama pada bagian pelayanan dan operator desa.

Faktor Pendorong Digitalisasi di Desa Banjarsari

Berdasarkan dari hasil pengabdian yang ada di Desa Banjarsari, ditemukan bahwa adanya faktor-faktor yang dapat mendorong konsep dan proses digitalisasi dalam pelayanan publik di Desa Banjarsari. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah adanya dukungan secara langsung dari Kepala Desa Banjarsari mengenai digitalisasi pelayanan di Desa Banjarsari. Sarana dan prasarana di Desa Banjarsari telah mendukung adanya pelaksanaan proses digitalisasi ini seperti fasilitas wifi yang memadai dalam pengoperasian pelayanan secara digital. Masyarakat Desa Banjarsari yang bersikap antusias terhadap digitalisasi pelayanan karena hal itu dapat membawa dampak baik bagi pelayanan publik di Desa Banjarsari yang lebih efektif dan efisien. Maka dari itu, perlunya memahami upaya-upaya yang dapat mendorong digitalisasi pelayanan di Desa Banjarsari agar proses digitalisasi di Desa Banjarsari dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Faktor Penghambat Digitalisasi di Desa Banjarsari

Selain pendorong pada proses digitalisasi di Desa Banjarsari ini, terdapat pula beberapa faktor yang menghambat proses digitalisasi ini diantaranya adalah kurangnya kualitas sumber daya manusia yang ada di desa. Hal itu disebabkan karena para perangkat desa kurang memiliki pemahaman yang mendalam di bidang IT. Ketersediaan ruangan yang ada di Balai Desa Banjarsari yang digunakan untuk pelayanan sangat terbatas sehingga kurang mendukung proses digitalisasi pelayanan di desa ini. Hal itu dapat berdampak kepada buruknya kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kurangnya pengetahuan dari masyarakat dalam hal digitalisasi pelayanan terutama tentang website desa. Padahal, pengetahuan masyarakat sangat dibutuhkan dalam mendukung proses digitalisasi pelayanan. Maka dari itu, diperlukan adanya edukasi

yang lebih terstruktur dan menyeluruh kepada masyarakat Desa Banjarsari mengenai pengoperasian website desa.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan sebagai upaya peningkatan pelayanan berbasis digital guna membangun dan mewujudkan Desa Banjarsari sebagai desa digital. Melalui tiga tahapan kegiatan yang telah dilakukan yakni dimulai dari pelaksanaan workshop pengelolaan website desa, sharing session bersama perangkat Desa Banjarsari dan pendampingan pengisian website desa. Kegiatan ini disambut dengan baik oleh seluruh perangkat Desa Banjarsari karena memberikan banyak manfaat terhadap peningkatan kualitas pelayanan desa. Dengan adanya workshop pengelolaan website desa, pihak perangkat desa menjadi lebih berinovasi dan dapat mengupdate informasi dalam desa untuk disebarluaskan kepada masyarakat dan mampu menunjukkan akuntabilitas kinerja pemerintah desa. Kegiatan kedua yakni sharing session bersama perangkat desa yang dilaksanakan melalui sesi tukar pikiran dan panel diskusi. Dengan adanya kegiatan tersebut pemerintah Desa Banjarsari dapat mengungkapkan kendala yang dialami selama memberikan pelayanan dan kurangnya pengelolaan website desa yang ada, sehingga Mahasiswa MBKM Bina Desa Banjarsari dapat memberikan solusi dan saran atas permasalahan yang sedang dihadapi. Tahapan yang terakhir yakni pendampingan pengisian website desa. Kegiatan ini berjalan dengan memberikan pendampingan dan pemahaman kepada perangkat desa mengenai pengoperasian website desa yang harus berkembang secara terus menerus mengikuti dinamika perubahan yang ada di Desa Banjarsari.

Dengan adanya program ini diharapkan agar perangkat Desa Banjarsari mampu meningkatkan pelayanan berbasis digital sehingga mampu mempermudah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta terciptanya pemerintah desa yang akuntabel, transparansi dan terwujudnya Desa Banjarsari sebagai desa digital.

DAFTAR REFERENSI

- Airlangga, P., Harianto, H., & Hammami, A. (2020). Pembuatan dan Pelatihan Pengoperasian Website Desa Agrowisata Gondangmanis. *Jumat Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Informatika*,1(1),9–12. https://ejournal.unwaha.ac.id/index.php/abdimas_if/article/view/1046
- Aris, V., Alam, S., Ashdaq, M., Taufik, M., & Jamil, M. (2023). Pelatihan Perancangan Website Profil Kelurahan Bontonompo. *ABDIKAN: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sains dan Teknologi*, 2(3), 393-399.

- Budiman, A., Suprayogi, S., & Pranoto, B. E. (2021). Pendampingan dan Pelatihan Pengelolaan Website SMA Negeri 1 Semaka Tanggamus. *Journal of Social Sciences and Technology for Community Service (JSSTCS)*, 2(2), 150-159.
- Dewa Gede Atmajaya and Gede gede Wirata ,2021, “Peranan E- Government dalam Meningkatkan Pelayan Publik Desa Sanding Kecamatan Tampak Siring”, *Widyana* Vol. 18 No.1.
- Febriyanti, N. M. D., Sudana, A. K. O., & Piarsa, I. N. (2021). Implementasi Black Box Testing pada Sistem Informasi Manajemen Dosen. *Jurnal Ilmiah Teknologi Dan Komputer*, 2(3), 535-544.
- Hamza, S., Somadayo, S., Noh, J., & Santosa, S. (2022). Pendampingan Pengisian Data Desa Pada Website Desa Berbasis Opensid di Desa Worat-Worat dan Tacim Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Biosainstek*, 5(1), 63–69. <https://doi.org/10.52046/biosainstek.v5i1.1383>
- Hardjaloka, Loura. 2014. “Studi Penerapan E-Government Di Indonesia dan Negara Lainnya Sebagai Solusi Pemberantasan Korupsi Di Sektor Publik”. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional* Volume 3 Nomor 3 ISSN 2089-9009.
- Izzah, N. (2020). Pelatihan membuat dan mengelola website sekolah. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 1(2), 247-256.
- Muhammad Badri. (2016). Pembangunan Pedesaan Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi. *Risalah*, 27(2), 62–73.
- Oktavya, Ayu Aditya. 2015. “Penerapan (Electronic Government) e-Government Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dalam Pemberian Pelayanan Di Kota Bontang”. *eJournal Pemerintahan* Volume 3 Nomor 3 Tahun 2015 hal: 1433-1447
- Redy, E., Jupriyadi, J., Neneng, N., Putra, R. A. M., & FITRI, A. (2022). Pelatihan Penggunaan Website Desa Bagi Para Staff Di Desa Banjarsari, Kabupaten Tanggamus. *Journal of Social Sciences and Technology for Community Service (JSSTCS)*, 3(1), 79. <https://doi.org/10.33365/jsstcs.v3i1.1800>
- Suyatna, R. (2019). Desa Digital sebuah Konsep Katalisasi Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Januari*, 1, 22–26. www.juliwi.com
- Somad, M. A., Ardiansyah, R., Irmawati, M., & Nuraeni, N. (2023). Perancangan Website dan Pelatihan Pelayanan Online Bagi Perangkat Desa Adisana Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas. *Abdimasku: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 38-45. *Madaniya* ISSN 2721-4834 1407
- Supriyono, S. (2020). Software testing with the approach of blackbox testing on the academic information system. *IJISTECH (International Journal of Information System and Technology)*, 3(2), 227-233.
- Surahman, A., Sari, T. D. R., Andraini, L., & Ismail, I. (2023). Pelatihan Pengelolaan Website Desa. *Journal of Engineering and Information Technology for Community Service*, 1(3), 104-108.

Sutiah, S., & Supriyono, S. (2021, February). Software testing on e-learning Madrasahs using Blackbox testing. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 1073(1), 012065

Wardani, A. K. (2018). AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA DENANYAR KECAMATAN JOMBANG KABUPATEN JOMBANG.

Zanuar Rifai, Trias Bratakusuma, Ratna Arvianti, Desember 2019, ” Perancangan Sistem Informasi Desa Terintegrasi Studi Kasus Desa Melung”, ITCIDA Vol.5 No.2.